

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT



**RENJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA JAMBI T.A. 2025**

I. Latar Belakang

A. Kondisi Umum

Tahun 2025 memasuki tahun pertama dari lima tahun penyusunan Rencana Strategis Polri 2025-2029 yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Polri Tahun 2025. Sehingga seluruh Satker Polda Jambi berkewajiban untuk membuat Rencana Kerja T.A. 2025. Rencana kerja Polda Jambi Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari *Grand Strategy* Polri (2025-2045) yang dalam penyusunan Rencana Strategis Polda Jambi Tahun 2025-2029 dimasa transisi tahun 2024.

Rencana Kerja Polda Jambi Tahun 2025 memperhatikan RPJMN 2025-2029, yaitu: (1) pilar Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen, dan Penanggulangan Terorisme; (2) pilar Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai "*Safe Guarding*" penuntasan target prioritas Nasional. Mengingat tahun 2025 mulai masuknya tahun pertama Renstra Polda Jambi juga berada pada masa transisi pemikiran RPJPN dengan sejalan *road map* Visi dan Misi Indonesia 2025-2045.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus yang menjadi perhatian publik, kodusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat, Seluruh keberhasilan Polda Jambi dan jajaran dalam pengungkapan kasus sehingga

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Jambi, hal ini menunjukkan bahwa Polda Jambi dicintai oleh masyarakat, sehingga Polda Jambi bisa memperbaiki dan selalu berbenah profesional SDM dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh keberhasilan Polda Jambi dalam pengungkapan kasus yang menjadi perhatian publik, khususnya tindak pidana, Siber, Narkoba Korupsi maupun kejahatan Transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai oleh Polda Jambi tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Jambi dengan didukung oleh eksklusif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas kepolisian.

Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polda Jambi oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polda Jambi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang. Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan dimasa mendatang.

Adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah: (1) Polri yang semakin profesional, cerdas, berintegritas, transparan, adil, dan humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang “Presisi”; (2) menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dan PPKT dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaan anggota Polri dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil, legal dan humanis serta setara (*equality before the law*), terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan

tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi dan peran intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti masih ditemukannya: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan siber, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang.

Dalam perkembangan *lingkungan strategis regional* masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme.

Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polri T.A 2025.

Dalam Rencana Kerja di Tahun 2025, Polri telah menyusun Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri T.A. 2025, yang berisi seperangkat sasaran

prioritas Polri dan arah kebijakan untuk dipedomani dalam rencana kerja dan anggaran. Dalam Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri T.A. 2025, terdiri dari 6 Sasaran Prioritas, 5 Program dan 109 Kegiatan. Selain itu penyusunan Rancangan Rencana Kerja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Polri T.A. 2025 memuat arah kebijakan dan Strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Bidhumas Polda Jambi T.A. 2025 mengakomodir:

1. Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan *Draft Grand Strategi* Polri tahun 2025-2029;
2. Program Kapolri “*Transformasi Menuju Polri Yang Presisi*” guna mendukung mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;
3. Perkiraan Intelijen Polda Jambi Tahun 2025, prediksi ancaman yang diperkirakan menjadi potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2025;
4. Sasaran Prioritas Bidhumas Polda Jambi Tahun 2025;
5. Arah Kebijakan Bidhumas Polda Jambi untuk mewujudkan Sasaran Prioritas Tahun 2025;
6. Program Anggaran dan Kegiatan Bidhumas Polda Jambi Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Bidhumas Polda Jambi T.A. 2025 juga memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan isu-isu strategis seperti demokratisasi, paham radikalisme, intoleransi, HAM, lingkungan hidup serta faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang dinamis akan dijadikan pertimbangan dan bahan masukan dalam penyusunan rancangan rencana Polda Jambi Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Jambi yang dipengaruhi oleh perubahan perubahan dan

perkembangan lingkungan strategis global tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

1. Perkembangan Aspek Kehidupan

a. Aspek Ideologi

- 1). ideologi menjadi persoalan bahkan diperalat sebagai kendaraan untuk kepentingan politik dari pihak-pihak/kelompok-kelompok tertentu. Upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dilakukan baik melalui jalur politik maupun melalui gerakan-gerakan oleh kelompok radikal. Pemahaman sempit Pancasila sebagai ideologi negara menjadi katalis bagi pertumbuhan/perkembangan ideologi lain yang bertentangan;
- 2). penyebaran paham ideologi Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) yang masih telah mempengaruhi eksistensi kelompok jaringan terorisme maupun masyarakat yang memiliki pemahaman radikal untuk membangun negara Islam (Khilafah), selaras dengan perjuangan DI/TII untuk membangun Negara Islam Indonesia (NII). Mereka masih bergerak secara klaendestein dan berpotensi mempengaruhi kelompok militan untuk melakukan aksi kekerasan dan persekusi terhadap kelompok sesama umat maupun yang berbeda agama, dengan melakukan aksi persekusi serta kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat penegak hukum sebagai sasaran aksi amaliyah;
- 3). saat ini Indonesia berada di tengah-tengah pertarungan ideologi asing yang bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat dan mengancam kebhinekaan yang telah menjadi komitmen bangsa. Ancaman masuknya ideologi asing dapat menggoyahkan ketahanan ideologi nasional, dan berdampak pada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ideologi itu antara lain ideologi radikal yang membawa semangat pan-islamisme, ideologi komunis

- yang berupaya memengaruhi kebijakan negara terhadap kelompok sosial paling bawah (proletar) serta kebijakan ultra nasionalisme AS untuk mendorong imperialisme dan dominasi AS di dunia;
- 4). di wilayah Propinsi Jambi bagi organisasi politik dan organisasi masyarakat lainnya sudah masih sepenuhnya mendasari cara berpikir/ pandangan dan menghayati Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Namun ada beberapa kelompok kecil yang terindikasi memberikan doktrin terhadap ideologi lain yaitu ideologi berdasarkan agama tertentu atau khilafah;
 - 5). gerakan reformasi telah membawa perubahan yang cukup besar dalam kehidupan berpolitik masyarakat daerah Jambi hal ini terlihat dari meningkatnya kegiatan penyampaian aspirasi, unjuk rasa (demonstrasi) khususnya yang dilaksanakan oleh kalangan mahasiswa, karyawan/buruh, warga transmigrasi, petani dan nelayan;
 - 6). kegiatan dan keberadaan kelompok/perorangan yang menginginkan pergantian ideologi Pancasila menjadi ideologi alternatif lainnya melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti:
 - a). radikalisme
 - b). ekstranisme
 - c). konsumerisme
 - d). eksklusivisme
 - e). penyebaran hoaks dan informasi yang memecah belah bangsa dan negara (bertentangan sila ke-3 Pancasila).

b. Aspek Politik (Potensi Gangguan)

- 1). hasil Pemilu 2024 telah menghadirkan komposisi baru baik dieksekutif maupun legislatif. Penyelesaian terhadap RUU yang belum rampung dan menjawab peraturan

- perundangan yang dianggap bermasalah akan menjadi konsentrasi Pemerintah dan DPR;
- 2). pembentukan Kabinet baru akan diwarnai dengan adanya revisi terhadap koalisi hasil Pemilu;
 - 3). penyesuaian Program, Kebijakan dan anggaran akan menjadi fokus pemerintahan baru. Hal ini untuk mewujudkan janji politik dan visi Indonesia;
 - 4). fungsi pemerintahan belum efektif karena masih dalam proses peralihan kebijakan, anggaran dan program;
 - 5). potensi munculnya konflik horizontal dalam menyikapi hasil Pemilu 2024 terutama dalam pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 6). perpindahan Ibukota Negara, meskipun belum menjadi fokus 2025, akan menjadi perbincangan hangat. Hal ini erat kaitannya dengan arah pembangunan dan pemerataan dan otonomi daerah;
 - 7). sengketa Pemilu 2024 di Provinsi Jambi;

Pemilu 2024 yang merupakan Pemilu paralel pertama kali, Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak dan akan menyisakan sejumlah sengketa. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang, kewibawaanya menurun karena perilaku hakim yang melanggar etik. Kondisi ini dapat memicu adanya konflik horizontal. Sengketa yang mungkin berlarut antara lain:

 - a). perhitungan suara Gubernur/Wakil Gubernur
 - b). perhitungan suara Bupati/Wakil Bupati
 - c). perhitungan suara Walikota/Wakil Walikota

Adapun menjelang Pemilu serentak 2024 diwarnai dengan narasi dan komunikasi yang dilakukan oleh para elit politik memunculkan isu yang berkembang yang menuai potensi konflik di masyarakat.
 - 8). Pemilihan Persiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029. Pemilu 2024 telah menghasilkan Prabowo Subianto

- sebagai Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih untuk periode tahun 2024-2029;
- 9). Pelaksanaan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden sudah dapat dipastikan dilaksanakan 1 putaran dan calon Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, akan membentuk Kabinet baru yang diwarnai dengan adanya revisi terhadap koalisi hasil Pemilu;
 - 10). pada Tahun 2025, dampak dari Pilkada serentak Tahun 2024 akan mempengaruhi gangguan Kamtibmas seperti terjadinya aksi unjuk rasa dari para simpatisan yang calonnya tidak terpilih, sehingga diprediksi akan menyebabkan gangguan Kamtibmas dimasyarakat;
 - 11). Jumlah anggota DPRD Provinsi Jambi yang akan dilantik
Jumlah anggota DPRD Provinsi Jambi yang akan dilantik tahun 2024 sebanyak 55 orang anggota DPRD Provinsi Jambi, diantaranya;
Dapil Jambi 1 Kota Jambi sebanyak 10 orang, Dapil Jambi 2 Batanghari-Muara Jambi sebanyak 10 orang, Dapil Jambi 3 Sarolangun-Muara Merangin sebanyak 10 orang, Dapil 4 Kerinci-Sungai Penuh sebanyak 6 orang, Dapil 5 Bungo-Tebo sebanyak 10 orang, Dapil 6 Tanjung Jabung Barat-Tanung Jabung Timur sebanyak 9 orang.
 - 12). permasalahan atau isu-isu terkait Pilkada serentak Tahun 2024, adalah:
 - a). pertama kali dilaksanakan secara serentak se Indonesia;
 - b). permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - c). TNI/POLRI dan ASN ikut serta/cawe-cawe dalam PILKADA dan menjadi pertanyaan kenetralanya;
 - d). Permasalahan distribusi logistik;
 - e). Kondisi geografis dan bencana alam/cuaca ekstrem masing-masing daerah;

- f). Permasalahan rekapitulasi perolehan suara;
 - g). Antisipasi pemungutan suara ulang (PSU);
 - h). Adanya Money politik paslon peserta PILKADA;
- 13). berakhirnya masa jabatan kepala daerah di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
- a). Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada Bulan Desember 2024;
 - b). Bupati Tanjab Barat berakhir pada bulan Desember 2024;
 - c). Bupati Batanghari berakhir pada bulan Desember 2024;
 - d). Bupati Tanjab Timur berakhir pada bulan Desember 2024;
 - e). Bupati Bungo berakhir pada bulan Desember 2024;
 - f). Walikota Sungai Penuh berakhir pada bulan Desember 2024.
 - g). Konflik internal partai politik juga sering mewarnai dinamika perpolitikan Jambi terutama yang dipicu oleh estafet pergantian kepemimpinan maupun akibat perbedaaan dukungan calon Gubernur, Bupati dan Walokota Jambi. Akibat konflik tersebut beberapa partai pecah, eleksabilitasnya menurun dan para kadernya berubah dukungan;
 - h). Berita *hoax* dan sara mulai bertebaran dengan dekatnya agenda Pemilukada yang mampu membuat gaduh Harkamtibmas di Provinsi Jambi;

c. Aspek Ekonomi

- 1). perekonomian nasional diprediksi akan mengalami ketidakpastian Tahun 2025, hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, krisis pangan dan energi, Inflasi yang tinggi, melemahnya nilai

- tukar rupiah terhadap dolar serta kenaikan suku bunga bank sentral, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan perekonomian mulai dari kontraksi ekonomi yang menuju resesi ekonomi hingga stagflasi;
- 2). adanya permasalahan tumpang tindih lahan tambang, hutan, lingkungan, peraturan daerah yang kurang kondusif dan jaminan kepastian hukum dan keamanan serta gangguan kegiatan pertambangan liar (tanpa ijin);
 - 3). munculnya resistensi dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah karena dianggap merugikan masyarakat (kelangkaan gas subsidi, kenaikan tdl, bbm, dsb);
 - 4). pembangunan sektor pertanian masih banyak menghadapi kendala antara lain menyusutnya lahan pertanian masyarakat akibat tergusur oleh perumahan dan industrialisasi serta perusahaan perkebunan yang kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan;
 - 5). kurangnya rasa tanggung jawab pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin pemanfaatan sumber daya hutan, kurangnya pengawasan hutan oleh polisi kehutanan serta lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dalam menegakkan pelanggaran hukum dibidang kehutanan;
 - 6). Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan tenaga kerja, sehingga ada kecenderungan resistensi dari pihak pekerja untuk mendesak direvisinya undang-undang ini;
 - 7). sengketa lahan/hutan antara perusahaan dengan masyarakat masih akan terus terjadi dikarenakan tidak adanya kepastian dari pemerintah pusat maupun daerah dalam penyelesaian lahan tersebut secara tuntas;

- 8). maraknya aktifitas pertambangan batu bara dan pertambangan emas tanpa ijin di beberapa daerah dalam provinsi jambi seperti kabupaten merangin, kabupaten sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari masih akan terus terjadi mengingat ini merupakan peluang mata pencarian bagi sebagian masyarakat namun juga berdampak buruk bagi kerusakan lingkungan, memakan korban jiwa, menimbulkan kemacetan dan berdampak pada kelangsungan ekonomi di beberapa daerah yang dilalui oleh jalur batubara, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial dimasyarakat.

d. Aspek Sosial Budaya

- 1). kondisi perkembangan bidang sosial budaya diwarnai dengan permasalahan antara lain, tingginya angka pengangguran, masalah buruh yang memicu terjadinya aksi unjuk rasa, konflik antar masyarakat yang disebabkan perbedaan prinsip keagamaan maupun permasalahan lainnya yang memicu terjadinya tindak kekerasan;
- 2). segregasi masyarakat akan semakin kuat dalam menyikapi hasil Pemilu 2024 dan berpotensi konflik horizontal di sejumlah wilayah;
- 3). tidak adanya keseimbangan dalam pembangunan wilayah antara pembangunan SDM dan wilayah (keseimbangan geografi dan demografi);
- 4). Kehidupan umat beragama telah mampu mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, namun masih bersifat formalistik dan belum mampu meningkatkan keberimanan dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- a). Jamaah Ahmadiyah di tiga kabupaten/ kota yakni Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun dan Kerinci;
 - b). Jamaah Tarikhat Naqshabandiah di Kabupaten Batanghari;
 - c). Majelis Tafsir Alqur'an di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci.
- 5). Konflik horizontal dan vertikal di beberapa daerah yang dilatar belakangi masalah pertanahan, perkebunan, pertambangan dan perbatasan wilayah masih akan mewarnai situasi keamanan dalam Provinsi Jambi. Termasuk kondisi saat ini ada kecenderungan luntarnya nilai-nilai luhur atau "kebhinekaan" dalam pergaulan hidup antar kelompok masyarakat menimbulkan aksi-aksi intoleran antar umat beragama khususnya Ormas-ormas yang dilatarbelakangi agama;
 - 6). Masalah keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang diperkerjakan sebagai tenaga ahli di Perusahaan-perusahaan seiring dengan kedatangannya yang tidak terkendali sehingga memicu kesenjangan dengan penduduk lokal. Kondisi ini rawan dimanfaatkan sebagai isu politik, isu sara yang dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik;
 - 7). Dampak negatif perkembangan teknologi terutama media sosial dan penyimpangan teknologi dapat terjadi di semua kalangan masyarakat dan terjadi di semua wilayah termasuk ke pelosok-pelosok desa yang terjangkau dengan jaringan internet dan telekomunikasi. Kasus yang rawan terjadi yakni tindak kekerasan, pornoaksi/pornografi, prostitusi, penipuan, penyimpangan sosial, isu-isu yang bersifat provokasi, ujaran kebencian, hoaks dan bahkan dapat memicu terjadinya konflik sosial;
 - 8). Masalah peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan di daerah-daerah terpencil, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang mendapat

- perhatian pemerintah, dihadapkan lagi pada sistem pemerataan perluasan pendidikan yang kurang baik, pola manajemen yang tidak efisien. Kurang efisien dan kurang relevannya pendidikan dengan tuntutan perubahan, proses pembelajaran yang menekankan pada pencapaian target dengan mengabaikan aspek kualitas, pola pengajaran yang masih berorientasi pada guru, rendahnya kualitas guru dan kualifikasi mengajar guru.
- 9). masalah sosial seperti, supremasi hukum, Kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup dan pelayanan masyarakat telah dimanfaatkan menjadi isu-isu yang menarik untuk dipolitisasi oleh kelompok Mahasiswa/LSM, Aktivis dan Kelompok Masyarakat lainnya dalam bentuk aksi unjuk rasa;
 - 10). permasalahan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah, cenderung terjadi eksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dampak kegiatan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat serta telah menimbulkan reaksi dari masyarakat setempat dengan melakukan aksi protes terhadap pemerintah maupun aksi menutup kegiatan penambangan bentuk eksploitasi yang telah menimbulkan pro dan kontra di daerah hukum Polda Jambi;
 - 11). Pemerintah Daerah Jambi mendukung peluncuran bursa karbon Indonesia yang diresmikan Presiden Joko Widodo, guna melawan krisis perubahan iklim khususnya di daerah Jambi, guna mengatasi dampak yang terjadi kenaikan suhu, kekeringan dan banjir hingga polusi;
 - 12). Jumlah penduduk miskin Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi tercatat sebesar 265,42 ribu orang, yang merupakan penurunan dari 280,68 ribu orang pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin juga menurun dari 7,58% pada Maret 2023 menjadi 7,10% pada Maret 2024. Penurunan ini

terlihat baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, persentase kemiskinan turun dari 10,19% menjadi 9,50%, sementara di perdesaan, angka kemiskinan menurun dari 6,28% menjadi 5,90% dalam periode yang sama. Garis kemiskinan di Jambi juga mengalami peningkatan, di mana pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 650.115 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini mencerminkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan;

- 13). Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan pertama 2024, ekonomi Jambi tumbuh sebesar 3,83% secara tahunan meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,42% dibandingkan triwulan sebelumnya. Memasuki triwulan kedua 2024, pertumbuhan ekonomi Jambi meningkat menjadi 4,15% secara tahunan

- 14). Gubernur Jambi menargetkan pertumbuhan ekonomi provinsi ini bisa mencapai di atas 5% sepanjang tahun 2024, didorong oleh berbagai faktor seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan stabilitas inflasi. Selain itu, pengoperasian infrastruktur strategis seperti tol Betung-Tempino juga diharapkan memberikan dorongan tambahan bagi perekonomian Jambi, Secara keseluruhan, Jambi menunjukkan perbaikan ekonomi yang stabil dengan peningkatan di sektor-sektor kunci, meskipun ada tantangan seperti fluktuasi harga komoditas yang mempengaruhi sektor pertanian dan perdagangan.

e. Aspek Keamanan

- 1). potensi konflik horizontal akibat tingkat kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum masih rendah apabila tidak diantisipasi dengan baik akan

- menimbulkan gangguan keamanan disetiap tempat dan waktu serta bertindak dengan main hakim sendiri;
- 2). situasi keamanan yang masih perlu di waspadai adalah serangan teroris terutama terhadap kepentingan negara barat dengan negara-negara Islam di dunia, mengingat jaringan teroris Indonesia banyak yang terafiliasi dengan jaringan teroris internasional;
 - 3). masih adanya beberapa aliran yang diduga menyimpang dari syariat islam yang benar membuat kelompok fanatisme agama terdorong untuk melakukan tindakan anarkis sehingga berpotensi timbulnya kasus yang bernuansa sara;
 - 4). *trend* peningkatan empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi) terutama kejahatan curanmor, curas dan curat merupakan kasus yang cukup tinggi dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya hal tersebut akibat perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan maupun problem sosial lainnya;
 - 5). penyalagunaan narkoba masih menjadi ancaman nasional dikarenakan Indonesia termasuk salah satu pasar yang potensial bagi pelaku jaringan narkoba Internasional serta kurangnya pengawasan lokasi yang rawan dijadikan jalur penyelundupan narkoba;
 - 6). ancaman lainnya yang juga perlu diwaspadai serta perhatian khusus yang diperkirakan akan terjadi pada Tahun 2025 adalah berupa bencana alam baik gempa bumi, kekeringan, polusi, bahaya banjir, tanah longsor dan bencana gunung meletus, hal tersebut diperkuat oleh pendapat beberapa pakar geologi dan geofisika yang menyatakan bahwa sudah ada tanda-tanda mulai aktifnya

- kembali gunung berapi Kerinci pulau Sumatra sebagai akibat pergeseran lempengan bumi;
- 7). Kondisi keamanan dapat dilihat dari gangguan Kamtibmas, gangguan Kamtibcar Lantas, gangguan Kamtibmas non pidana, dan situasi keamanan di masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota. Secara umum situasi keamanan sudah semakin kondusif khususnya di beberapa kabupaten dalam Provinsi Jambi, namun di beberapa daerah tertentu masih terjadinya kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti Curas dengan menggunakan Senpi, perkelahian antar desa atau antar kelompok dan geng motor;
 - 8). munculnya aksi-aksi geng motor (begal) dan tawuran antar pelajar menimbulkan keresahan masyarakat dan aksi tersebut telah menimbulkan korban jiwa adapun pola dan modus kelompok geng motor yang sering digunakan yaitu mengacungkan parang dan celurit berukuran panjang dengan mengendari konvoi sepeda motor dan di viralkan kejahatan menonjol konvensional lainnya masih terjadi di Daerah Hukum Polda Jambi antara lain:
 - a). Curas akibatkan korban luka/MD;
 - b). Curat dengan sasaran Waralaba;
 - c). pencurian kendaraan bermotor R2 dan R4;
 - d). penganiayaan berat akibatkan korban meninggal;
 - e). pembunuhan;
 - f). penipuan/penggelapan;
 - 9). Provinsi Jambi merupakan daerah lintas darat Sumatera (penghubung antar provinsi) digunakan sebagai akses dan tempat untuk melakukan kejahatan khususnya Curas/ Curat dan Narkoba oleh jaringan antar wilayah;
 - 10). Provinsi Jambi memiliki pelabuhan laut dan daratan yang terbuka disepanjang Sungai Batang Hari yang sangat dimungkinkan untuk penyelundupan orang dan barang dari dan menuju luar negeri;

- 11). Kasus kejahatan Curanmor yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya, hal ini dapat dilihat dari jumlah kerugian yang dialami korban maupun Modus Operandi yang dilakukan oleh para terindikasi dengan adanya proses pembelian melalui *leasing* dengan uang muka yang sangat ringan yang di *back up* asuransi, hal ini juga dipengaruhi oleh karena adanya kemudahan masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan bermotor dengan *Down Payment* (DP) rendah/kecil karena didukung oleh Lembaga Keuangan Non Bank (*Leasing*) serta adanya jaminan penggantian biaya oleh pihak asuransi apabila kendaraan itu hilang atau dicuri;
- 12). Trend situasi Kamtibmas dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal tersebut disebabkan bertambahnya jumlah penduduk dalam Provinsi Jambi dan dampak dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik global maupun nasional;
- 13). Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Jambi dan jajaran pada tahun 2025 diperkirakan akan diwarnai dengan berbagai jenis dan bentuk gangguan Kamtibmas baik dalam dimensi kejahatan/tindak pidana maupun gangguan keamanan non pidana, hal ini seiring dengan dilaksanakan PILKADA Gubernur/Bupati/Walikota Jambi Tahun 2024.
- 14). pencemaran lingkungan akibat limbah industri, eksploitasi secara ilegal sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat, hal tersebut apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan potensi gangguan keamanan akibat konflik/sengketa dengan masyarakat setempat yang berujung aksi anarkis.

f. Provinsi Jambi

Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang Ibu kotanya berada di Kota Jambi, dibentuk berdasarkan UU No 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, merupakan Provinsi yang memiliki luas 53.435 km². Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan [Provinsi Riau](#), sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan [Provinsi Sumatera Selatan](#) dan sebelah Barat dengan [Provinsi Sumatera Barat](#) dan [Provinsi Bengkulu](#). Kondisi geografis yang cukup strategis di antara kota-kota lain di Provinsi sekitarnya membuat peran Provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari Provinsi ini.

Luas Provinsi Jambi 53.435 km² dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi berjumlah 3.532.126 jiwa atau dengan tingkat kepadatan 66,10 jiwa/km². Sebanyak 57,7% dari jumlah tenaga kerja Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan; 15,9% pada sektor perdagangan dan 26,4% pada sektor jasa. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian besar masyarakat di Provinsi ini sangat tergantung pada hasil pertanian, perkebunan sehingga menjadikan upaya pemerintah daerah maupun pusat untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui pengembangan sektor pertanian.

Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni Suku Melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi sebesar 37,87%. Selain itu juga ada Suku Kerinci di daerah Kerinci dan sekitarnya yang berbahasa dan berbudaya mirip Minangkabau. Secara sejarah dan budaya merupakan bagian dari varian rumpun Minangkabau, Juga ada suku-suku asli pedalaman yang masih primitif yakni Suku Kubu dan Suku Anak Dalam.

Selain itu juga ada pendatang yang berasal dari [Minangkabau](#), [Batak](#), [Jawa](#), [Sunda](#), [Cina](#), [India](#) dan lain-lain.

- 1). Sebagian besar masyarakat Jambi memeluk agama [Islam](#), yaitu sebesar 96,5%, sedangkan lainnya merupakan pemeluk agama [Kristen](#), [Buddha](#), [Hindu](#) dan [Konghuchu](#).
- 2). Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 26,1 °C sampai dengan 31 °C dan luas wilayah 53,435 km² diantaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. [Kelapa sawit](#) dan [karet](#) menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 259.786 hektar serta karet mencapai 623.825 hektar. Sementara itu, nilai produksi kelapa sawit sebesar 3.110 kg/ha pertahun. Hasil perkebunan lainnya adalah karet, dengan jumlah produksi 225,702 ton per tahun, kelapa dalam (*virgin coconut*) 119,600 ha menghasilkan 1.385kg/ha pertahun, casiavera 49,529 ha menghasilkan 2.626 kg/ha pertahun, serta teh 2.625 ha menghasilkan 2.328 kg/ha pertahun. Sementara produksi sektor pertanian yang dihasilkan oleh kawasan bagian barat Provinsi Jambi yaitu beras kerinci, kentang, kol/ kubis, tomat dan kacang kedelai.
- 3). Potensi kekayaan alam di Provinsi Jambi adalah [minyak bumi](#), [gas bumi](#), [batu bara](#) dan timah putih. Jumlah potensi minyak bumi Provinsi Jambi mencapai 1.270,96 juta m³ dan gas 3.572,44 milyar m³. Daerah cadangan minyak bumi utama di struktur Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari dengan jumlah cadangan minyak 408,99 juta barrel. Sedangkan cadangan gas bumi utama di struktur Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian. [Kabupaten Muaro Jambi](#) dengan jumlah cadangan 2.185,73 milyar m³. Wilayah

administratif pemerintahan, pada tahun 2023 Provinsi Jambi terdiri dari 2 kota dan 9 Kabupaten yaitu : Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci. Dan akan diwacanakan pembentukan provinsi baru dimana wilayah yang ada di provinsi Jambi akan berpisah. Kota Sungai Penuh Polresnya masih bergabung dengan Polres Kerinci, sedangkan untuk Polsek di jajaran Polda Jambi terdiri dari 94 Polsek dan 3 Polsubsektor (Polsek Urban sebanyak 5 Polsek, Polsek Rural sebanyak 81 Polsek dan Polsek Prarural sebanyak 8 Polsek);

2. Analisis

- a. Pelaksanaan tugas Bidhumas Polda Jambi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari faktor internal dan eksternal sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi Bidhumas Polda Jambi yang saat ini memiliki personel yang sudah tergelar mulai dari Bidhumas Polda Jambi sampai dengan Polsubsektor yang telah didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak akan diusulkan kembali untuk kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi 80%;
- b. Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain: gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan

masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. *Trend* peningkatan 4 jenis kejahatan, radikalisme, korupsi, Narkoba dan *Illegal Things (Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Fishing, Illegal Tapping)* menuntut Polri untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum. Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan antar lembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Semakin meningkatnya kejahatan *transnasional* sehingga lalulintas orang dan barang *illegal* semakin mudah dan cepat untuk dilakukan;

- c. Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang Ibu kotanya berada di Kota Jambi, dibentuk berdasarkan UU No 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, merupakan Provinsi yang memiliki luas 53.435 km². Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan [Provinsi Riau](#), sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan [Provinsi Sumatera Selatan](#) dan sebelah Barat dengan [Provinsi Sumatera Barat](#) dan [Provinsi Bengkulu](#). Kondisi geografis yang cukup strategis di antara kota-kota lain di Provinsi sekitarnya membuat peran Provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari Provinsi ini;
- d. Luas Provinsi Jambi 50.160,05 km² dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi berjumlah 3.760.275 jiwa atau dengan tingkat pertumbuhan pertahun sebesar 1,33%. Sebanyak 57,7% dari jumlah tenaga kerja Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan; 15,9% pada sektor perdagangan dan 26,4% pada sektor jasa. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian besar masyarakat di Provinsi ini sangat tergantung pada

hasil pertanian, perkebunan sehingga menjadikan upaya pemerintah daerah maupun pusat untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui pengembangan sektor pertanian;

- e. Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni Suku Melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi sebesar 37,87%. Selain itu juga ada Suku Kerinci di daerah Kerinci dan sekitarnya yang berbahasa dan berbudaya mirip Minangkabau. Secara sejarah dan budaya merupakan bagian dari varian rumpun Minangkabau, Juga ada suku-suku asli pedalaman yang masih primitif yakni Suku Kubu dan Suku Anak Dalam. Selain itu juga ada pendatang yang berasal dari [Minangkabau](#), [Batak](#), [Jawa](#), [Sunda](#), [Cina](#), [India](#) dan lain-lain;
- f. Sebagian besar masyarakat Jambi memeluk agama [Islam](#), yaitu sebesar 96,5%, sedangkan lainnya merupakan pemeluk agama [Kristen](#), [Buddha](#), [Hindu](#) dan [Konghuchu](#);
- g. Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 26,1 °C sampai dengan 31 °C dan luas wilayah 53,435 km² diantaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. [Kelapa sawit](#) dan [karet](#) menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 259.786 hektar serta karet mencapai 623.825 hektar. Sementara itu, nilai produksi kelapa sawit sebesar 3.110 kg/ha pertahun. Hasil perkebunan lainnya adalah karet, dengan jumlah produksi 225,702 ton per tahun, kelapa dalam (*virgin coconut*) 119,600 ha menghasilkan 1.385kg/ha pertahun, casiavera 49,529 ha menghasilkan 2.626 kg/ha pertahun, serta teh 2.625 ha menghasilkan 2.328 kg/ha pertahun. Sementara produksi sektor pertanian yang dihasilkan oleh kawasan bagian barat Provinsi

Jambi yaitu beras kerinci, kentang, kol/ kubis, tomat dan kacang kedelai;

- h. Potensi kekayaan alam di Provinsi Jambi adalah [minyak bumi](#), [gas bumi](#), [batu bara](#) dan timah putih. Jumlah potensi minyak bumi Provinsi Jambi mencapai 1.270,96 juta m³ dan gas 3.572,44 milyar m³. Daerah cadangan minyak bumi utama di struktur Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari dengan jumlah cadangan minyak 408,99 juta barrel. Sedangkan cadangan gas bumi utama di struktur Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian. [Kabupaten Muaro Jambi](#) dengan jumlah cadangan 2.185,73 milyar m³. Wilayah administratif pemerintahan, pada tahun 2023 Provinsi Jambi terdiri dari 2 kota dan 9 Kabupaten yaitu : Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabl Kabupaten... Kabupaten Kerinci. Dan akan diwacanakan pembentukan provinsi baru dimana wilayah yang ada di provinsi Jambi akan berpisah. Kota Sungai Penuh Polresnya masih bergabung dengan Polres Kerinci, sedangkan untuk Polsek di jajaran Polda Jambi terdiri dari 94 Polsek dan 3 Polsubsektor (Polsek Urban sebanyak 5 Polsek, Polsek Rural sebanyak 81 Polsek dan Polsek Prarural sebanyak 8 Polsek);
- i. Perkembangan lingkungan strategis luar negeri akan semakin dinamis dan kompleks, beberapa ancaman bagi kepentingan nasional antara lain:
- j. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang belum berakhir mempengaruhi kondisi ekonomi global dan menjadi ancaman terjadinya krisis pangan dan kiris energi dunia;

- 1). konflik antara Hamas dengan Israel yang belum berakhir dan dapat meluas ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah menjadi ancaman terhadap kondisi harga minyak dunia;
 - 2). pemberlakuan embargo Uni Eropa dan Amerika terhadap Rusia berdampak terhadap terhambatnya perdagangan global yang mengakibatkan kenaikan harga barang terutama di sektor migas;
 - 3). ancaman resesi ekonomi terhadap negara-negara berkembang akibat ketidakpastian situasi geopolitik internasional;
 - 4). ditemukannya penyakit baru yang bersifat menular yang diakibatkan oleh virus maupun bakteri.
- k. Perekonomian nasional diprediksi akan mengalami ketidakpastian Tahun 2025, hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, krisis pangan dan energi, Inflasi yang tinggi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta kenaikan suku bunga bank sentral, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan perekonomian mulai dari kontraksi ekonomi yang menuju resesi ekonomi hingga stagflasi;
- l. Kondisi perkembangan bidang sosial budaya diwarnai dengan permasalahan antara lain, tingginya angka pengangguran, masalah buruh yang memicu terjadinya aksi unjuk rasa, konflik antar masyarakat yang disebabkan perbedaan prinsip keagamaan maupun permasalahan lainnya yang memicu terjadinya tindak kekerasan;
- m. Potensi konflik horizontal akibat tingkat kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum masih rendah apabila tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan gangguan keamanan di setiap tempat dan waktu serta bertindak dengan main hakim sendiri;

- n. Situasi keamanan yang masih perlu di waspadai adalah serangan teroris terutama terhadap kepentingan negara barat dengan negara-negara Islam di dunia, mengingat jaringan teroris Indonesia banyak yang terafiliasi dengan jaringan teroris internasional;
- o. Masih adanya beberapa aliran yang diduga menyimpang dari syariat islam yang benar membuat kelompok fanatisme agama terdorong untuk melakukan tindakan anarkis sehingga berpotensi timbulnya kasus yang bernuansa sara;
- p. *Trend* peningkatan empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi) terutama kejahatan curanmor, curas dan curat merupakan kasus yang cukup tinggi dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya hal tersebut akibat perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan maupun problem sosial lainnya;
- q. Penyalagunaan narkoba masih menjadi ancaman nasional dikarenakan Indonesia termasuk salah satu pasar yang potensial bagi pelaku jaringan narkoba Internasional serta kurangnya pengawasan lokasi yang rawan dijadikan jalur penyelundupan narkoba;
- r. Ancaman lainnya yang juga perlu diwaspadai serta perhatian khusus yang diperkirakan akan terjadi pada Tahun 2025 adalah berupa bencana alam baik gempa bumi, gelombang tsunami, bahaya banjir, tanah longsor dan bencana gunung meletus, hal tersebut diperkuat oleh pendapat beberapa pakar geologi dan geofisika yang menyatakan bahwa sudah ada tanda-tanda mulai

aktifnya kembali gunung berapi di pulau Jawa dan Sumatra sebagai akibat pergeseran lempengan bumi;

- s. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri, eksploitasi secara ilegal sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat, hal tersebut apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan potensi konflik/sengketa dengan masyarakat setempat yang berujung aksi anarkis.

B. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Polri seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional akan semakin berat dan kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalis mekinerja Polri dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Polri yang semakin tinggi mengharuskan Polri Menyusun berbagai upaya dan langkah-langkah aksi yang konkret dan efektif dalam mewujudkan Kamdagri khususnya di Provinsi Jambi. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polda Jambi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. transformasi digital semakin cepat dan akan mengalami kemandegan seiring menipisnya daya dukung energi, transformasi digital dan kesenjangan digital masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan;
2. transformasi digital menjadi pendorong penting dalam respon terhadap pandemi untuk mengantisipasi resiko penularan dan memastikan penerapan jarak fisik (physical distancing), sementara juga memungkinkan kelangsungan layanan dan aktivitas ekonomi tertentu secara virtual. Perubahan kebiasaan seperti bekerja dan belajar jarak jauh juga menjadi norma bagi sebagian besar masyarakat;
3. isu korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan lingkungan serta kasus lahan di sejumlah tempat akan menjadi perhatian dan perbincangan pada tahun 2025;
4. Segregasi masyarakat berdasarkan SARA akan semakin menguat dengan adanya persiapan kontestasi Pemilu 2025, konflik SARA

terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap kelompok yang dipengaruhi oleh rendahnya toleransi di masyarakat. Adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu menjadi pemicu munculnya konflik antar etnis/suku, paham politik saat ini juga berperan dalam menciptakan kebencian antar suku/etnis dan umat beragama sehingga memicu timbulnya tindakan kekerasan yang berujung terjadinya konflik SARA;

5. pemanfaatan teknologi banyak mengarah pada kejahatan siber seperti spamming, phishing dan hacking;
6. kasus-kasus hukum yang dianggap mengganggu rasa keadilan masyarakat tampak masih akan menjadi perbincangan publik melalui “berita viral”;
7. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan terjadi dan mewarnai tahun 2025, serta masih akan tetap menyuarakan ideologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
8. masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlalulintas terutama di kota-kota besar masih menyimpan berbagai permasalahan krusial, dikaitkan dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat yang tidak selaras/berbarengan dengan perkembangan dan penambahan sarana prasarana jalan;
9. gangguan Kamtibcar Lantas berupa kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, khususnya di kota-kota besar serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas masih tingginya titik kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas sehingga gangguan Kamtibcarlantas berupa: kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan,

- khususnya di kota-kota besar serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;
10. rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum, menimbulkan kecenderungan mengabaikan aturan Undang-Undang, serta masih tingginya konflik sosial, aksi sweeping oleh ormas, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat perlu penanganan secara komprehensif;
 11. cepatnya perkembangan teknologi digital ditengah masyarakat yang sangat cepat, Polda Jambi dan jajarannya dituntut untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
 12. kejahatan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang masih terus terjadi dan perlu ditingkatkan penanganannya secara baik sesuai SPM serta membutuhkan penanganan khusus;
 13. penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak lingkungan serta ketahanan dan keamanan pangan;
 14. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah Gubernur/Walikota/Bupati dan pemilihan yang akan dilangsungkan pada akhir tahun 2024 dan berlanjut di tahun 2025 akan mengalami peningkatan dengan tingginya intensitas kegiatan politik baik yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam rangka mencari dukungan dan simpati masyarakat;
 15. Antisipasi keamanan Pilkada 2024 serentak dan pelantikan Kepada Daerah Tahun 2025;
 16. Peredaran narkoba, kejahatan korupsi, terorisme, kejahatan siber serta kejahatan konvensional masih sering terjadi dan meresahkan masyarakat;
 17. Masalah konflik sosial tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian karena masih adanya permasalahan baik di bidang perburuhan terkait UMK, pertanahan, perkebunan dan pertambangan terkait eksploitasi lahan yang dapat memicu munculnya konflik sosial yang akan berimbas pada stabilitas Harkamtibmas di daerah hukum Polda Jambi;
 18. Pelayanan Kamtibmas prima yang didukung peralatan yang berbasis teknologi di Polda Jambi belum optimal tergelar dan belum dapat di berdayakan secara efektif sampai komunitas terkecil di kewilayahan

sehingga kurang optimal dalam mendeteksi trend kejahatan yang berkembang dan meningkat;

19. Penyusunan kompetensi anggota Polda Jambi belum dapat memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kompetensi menuju Polri yang profesional, modern dan terpercaya sehingga diharapkan pelayanan prima yang pada gilirannya dapat dirasakan keberadaan Polda Jambi di tengah-tengah masyarakat di daerah hukum Jambi;
20. Masih adanya Polres yang daerah hukumnya tidak sama dengan wilayah administrasi pemda dan masih adanya beberapa Polsek yang daerah hukumnya meliputi 2 atau 5 Kecamatan;
21. Masih ada Polres, Polsek dan Polsubsektor yang belum memiliki tanah hak milik Polri serta masih ada lahan yang digunakan saat ini belum jelas status lahannya (apakah pinjam pakai/sewa) sehingga tidak bisa diajukan anggaran untuk pembangunan mako.
22. Isu korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan lingkungan serta kasus lahan di sejumlah tempat akan menjadi perhatian dan perbincangan pada tahun 2025;
23. Kurangnya pengawasan dan tanggung jawab keamanan atau keselamatan penumpang jasa angkutan udara, laut dan darat, mendorong meningkatnya angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil;
24. Penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
25. Masih tingginya titik kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas terutama yang disebabkan oleh angkutan berat batubara dan sawit;
26. Kegiatan illegal drilling di beberapa Kabupaten dalam Provinsi Jambi.

II. TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi dan Misi Polda Jambi

1. Visi Polda Jambi
“Terwujudnya Jambi yang Aman dan Tertib Guna Mendukung Indonesia Emas”.
2. Misi Polda Jambi:
“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di lingkungan Polda Jambi”.

B. Visi dan Misi Bidhumas Polda Jambi.

1. Visi Bidhumas Polda Jambi:
“Terwujudnya pelayanan Bidhumas Polda Jambi yang Profesional, Unggul dan Dipercaya dalam Pengelolaan Informasi Tentang Kinerja Polri ”.
2. Misi Bidhumas Polda Jambi:
 - a. Meningkatkan kompetensi SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam rangka mengelola informasi tentang kinerja Polri;
 - b. Meningkatkan dan menyempurnakan sistem dan metode yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidhumas Polda Jambi;
 - c. Memenuhi dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengemban fungsi Humas Polri baik di Pusat maupun Kewilayahan secara bertahap dan berkelanjutan;
 - d. Mengusulkan kebutuhan anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam melaksanakan pengelolaan informasi tentang kinerja Polri.

C. Tujuan Jangka Menengah

1. Polda Jambi
 - a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Hukum Polda Jambi;
 - b. Menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Polda Jambi;
 - c. Mewujudkan SDM Polda Jambi yang profesional;
 - d. Modernisasi pelayanan Polda Jambi; dan
 - e. Menerapkan Manajemen Polda Jambi yang terintegrasi dan terpercaya.

2. Bidhumas Polda Jambi
 - a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman dan penegakan hukum;
 - b. Terbangunnya kemitraan (partnership) antara Polri dengan segenap potensi masyarakat serta instansi/ lembaga pemerintah;
 - c. Tumbuhnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat jambi terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
 - d. Terciptanya rasa aman masyarakat dari gangguan fisik maupun psikis yang ditandai dengan;
 - e. Tergelarnya operasional Polri pada satuan-satuan kewilayahan dalam bentuk kegiatan preventif dan pre emtif dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- f. Terselenggaranya kegiatan Jumpa pers dengan media / wartawan Unit Polri;
- g. Tercapainya pemberitaan melalui media dengan baik;
- h. Terselenggaranya kerjasama dengan baik antar media dengan melalui copy morning, pembekalan wartawan.

D. Sasaran Prioritas Tahun anggaran 2025

1. Polda Jambi

Sasaran Prioritas Polda Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sinergitas polisi, masyarakat dan *stakeholder* dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara proaktif;
- b. Mewujudkan kualitas pelayanan publik polri yang semakin inovatif;
- c. Mewujudkan penegakkan hukum dan pelayanan penanganan perkara yang adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- d. Mewujudkan pengelolaan SDM yang mandiri, berintegritas dan profesional;
- e. Mewujudkan almatsus, perbekalan dan fasilitas konstruksi polri yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*;
- f. Mewujudkan budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

2. Sasaran Prioritas Bidhumas Polda Jambi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi bidang Humas dilingkungan Polri maka sasaran yang diprioritaskan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

"Tertatanya struktur organisasi Bidhumas Polda Jambi serta terpeenuhinya personal yang lebih efektif".

E. Keterkaitan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Menerapkan manajemen Polda Jambi yang terintegrasi dan terpercaya	Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani

F. Peta strategi



G. Rencana Capaian Target Strategis

Tabel 2.1
Rencana Capaian target (2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA TARGET		TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sistem pengawasan Polda Jambi yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	IKP.5	Nilai AKIP	79,85	80,00	80,25	80,75	81,00
			IKP.6	Nilai kinerja anggaran	90,04	90,10	90,13	90,15	90,18
			IKP.9	Nilai IKPA	91,50	2,00	92,25	92,50	93,00

III. PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN TAHUN 2025

A. Arah kebijakan dan Strategi Bidhumas Polda Jambi Tahun 2025

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Bidhumas Polda Jambi Tahun 2025, maka ditetapkan Arah Kebijakan dan Strategi.

1. Arah Kebijakan dalam rangka mencapai Sasaran Prioritas “tertatanya struktur organisasi Bidhumas Polda Jambi serta terpenuhinya personal yang lebih efektif”, dari strategi sebagai berikut :
 - a. mengedepankan Humas sebagai “ *Front Office*” yang berperan sebagai penjurur pencitraan yang professional, transparan dan akuntabel berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) yang tertata dalam system informasi terintegrasi (*networking*) dan terjalin dalam hubungan kemitraan sejajar serta menerima dan menyalurkan pengaduan, kritik,

saran/masukan, dan aspirasi masyarakat dalam rangka pencitraan positif Polri; (SS1/ IKP1);

- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia lembaga Humas Polri melalui pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun non formal;(giat3073/prog1);
- c. Melaksanakan pembangunan/pemenuhan sarana dan prasarana pengelola informasi dan dokumentasi berbasis teknologi mulai dari tingkat pusat sampai dengan pelayanan terdepan (Polsek) secara bertahap dan berkesinambungan;
- d. Pemanfaatan sumber daya secara optimal, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Humas; (SS1/,IKP1,2,3,4);
- e. Penguatan dan pengembangan organisasi Humas Polri di tingkat pusat dan kewilayahan sesuai dengan beban tugas, tuntutan tugas dan lingkungan strategis; (SS1/,IKP1,2,3,4);
- f. meningkatkan kompetensi personel bidang Humas sampai dengan tingkat terdepan/ujung tombak Polsek (Sihumas); (giat3073/prog2);
- g. peningkatan pembinaan karier personel Humas didasarkan pada kaderisasi, kompetensi fungsi Humas dan prioritas mendapatkan kesempatan pendidikan pengembangan serta promosi jabatan;
- h. memanfaatkan dan meningkatkan peran serta media massa serta pemangku kepentingan dalam rangka membangun opini positif dan pencitraan positif organisasi Polri; (giat 3073, 3070/prog2/SS1/IKP1/PPKprog13/giat44/Renaksi154,155,156);
- i terbangunnya kemitraan dengan media sosial dan media cetak ;

- j. meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja yang mewujudkan pelayanan prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat dan kebutuhan organisasi Polri; (giat5059,3073,3070,3149,5056/prog1,2/SS1/,IKP1,2,3,4);
- k. peningkatan kapasitas dan kapabilitas fungsi Humas yang siap menghadapi kondisi kontinjensi Kamtibmas, kejadian luar biasa melalui pengelolaan strategi komunikasi dan informasi serta siap pada berbagai operasi kepolisian di dalam maupun luar negeri, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan ;
 - 1). mengembangkan kemampuan dan kekuatan Personel dengan mengimplementasikan manajemen SDM Humas Polda Jambi yang berbasis kompetensi untuk mewujudkan personel yang profesional, modern dan bermoral serta terpenuhinya kebutuhan SDM seluruh jajaran Humas Polri secara proporsional dan bertahap;
 - 2). meningkatkan profesionalisme dan integritas penanggung jawab dan pelaksana manajemen program dan anggaran serta pengawasan dan pengendalian internal yang efektif secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - 3). pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi di tingkat pusat sampai kewilayahan, dalam rangka penerapan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (giat3073/prog2/ SS1/IKP1,2,3,4);
 - 4). pengelolaan barang milik negara sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN);

- 5). pembangunan dan internalisasi budaya organisasi termasuk budaya pelayanan Humas Polri hingga ke tingkat Bidhumas Polda, Polres dan Polsek disertai dengan upaya *reward and punishment*;
- 6). mengembangkan sistem dan prosedur Bidhumas yang mampu mewujudkan manajemen Bidhumas yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pembuatan produk Peraturan-peraturan; (SS1/IKP1);
- 7). membangun dan meningkatkan layanan pemerataan penyebaran/diseminasi informasi dalam rangka menciptakan opini positif Polri melalui kemitraan dengan media massa; (giat 3073,3070/prog2/SS1/IKP1/PPKprog13/giat44/Renaksi154,155,156);
- 8). melaksanakan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di bidang komunikasi khususnya media massa baik cetak, elektronik dan media online serta media sosial; (giat 3073,3070/prog2/SS1 /IKP1 /PPKprog13 /giat44/Renaksi154,155,156);
- 9). meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dibidang fungsi Humas melalui berbagai pelatihan dan ketrampilan;(giat3073/prog2/SS1/IKP1,2,3,4);
- 10). membangun dan mengembangkan sarana, prasarana serta kemampuan Bidhumas untuk mendukung tugas operasional kepolisian;
- 11). Meningkatkan kemampuan personel dalam pelaksanaan tugas-tugas peliputan sebagai bahan dokumentasi dan

publikasi sekaligus sebagai bantuan teknologi dalam penyelidikan dan penyidikan;(giat3073/prog2/PPK42/prog12/renaksi148,149,150);

- 12). meningkatkan data base yang mampu untuk menyajikan layanan informasi dan dokumentasi tentang kinerja Polri kepada internal dan eksternal Polri; (giat3073/prog2/PPK42/prog12/renaksi148,149,150);
- 13). mengembangkan dan peremajaan sarana dan prasarana PID yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri; (giat3073/prog2/PPK42/prog12/renaksi148,149,150)

IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF BIDHUMAS POLDA JAMBI TAHUN 2025

1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen

1). Tujuan:

Bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Bidhumas Polda Jambi dan kewilayahan.

2). kegiatan:

1). Penerangan Masyarakat:

- a). Konferensi Press;
 - b). Diskusi publik;
 - c). Kemitraan;
 - d). Kegiatan humas dan pemberitaan;
 - e). Publikasi pesan kamtibmas melalui baliho;
 - f). Berita online;
 - g). Honor narasumber diskusi publik;
 - h). Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
- 2). Dukungan layanan umum:
- a). Honor operator;
 - b). Peningkatan layanan informasi publik melalui penyebaran / diseminasi informasi;
 - c). Publikasi pesan kamtibmas melalui pemasangan baliho;
 - d). Produksi film ILM;
 - e). Produksi barang cetakan dikewilayahan;
 - f). Penayangan pesan kamtibmas melalui mobile trone;
 - g). Penyusunan majalah;
 - h). Pengelola website;
 - i). Kegiatan humas dan pemberitaan;
 - j). coffee morning;
 - k). Pendistribusian kalender;
 - l). Operasional PPID;
 - m). Operasional Multimedia
 - n). Produk infografis edukasi masyarakat;
 - o). Atk Rakernis;
 - p). Atk pelatihan;
 - q). Honor narasumber rakernis;
 - r). Honor narasumber pelatihan;
 - s). Rakernis;

- t). Pelatihan;
 - u). Dukgar penyusunan renja;
 - v). Dukgar Rarenja;
 - w). Dukgar LKIP;
 - x). Penyusunan RKA-KL;
 - y). Biaya perjalanan dinas;
 - z). Biaya perjalanan dinas biasa
- 3). Dukungan layanan perkantoran
- a). Gaji dan tunjangan;
 - b). Biaya keperluan kantor.
- 4). Pengelolaan Multimedia
- a). Giat patroli siber;
 - b). Penggalangan jaringan cybertroops dan netizen;
 - c). Penggalangan media sosial;
 - d). Penggalangan akun media sosial eksternal.
- 5). Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- a). Publikasi pesan kamtibmas melalui mobile trone;
 - b). Bimbingan teknis tentang informasi yang dikecualikan;
 - c). Pelatihan PPID Satker.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri
- 1). Perawatan kendaraan bermotor roda 4;
 - 2). Perawatan kendaraan bermotor roda 2;
 - 3). Perawatan peralatan kantor.

2. Pagu indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2025

a. Kebutuhan pagu indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2025. sebesar Rp. 4.882.904.000,-(Empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Rincian Pagu Indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2025. per **Jenis Belanja** sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai : Rp.2.357.120.000,-
- b) Belanja Barang : Rp.2.525.784.000,-

2) Rincian Pagu Indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2025. per **Sumber Anggaran** sebagai berikut:

- a) Rupiah Murni : Rp.4.882.904.000,-

3) Rincian Pagu Indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2025. per **Program** sebagai berikut:

- a) Penerangan Masyarakat Rp. 431.282.000.-
- b) Dukungan Manajemen Rp. 4.166.823.000.-
- c) Pengelolaan Mulmed Rp. 85.489.000.-
- d) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Rp. 109.010.000.-
- e) Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri Rp. 90.300.000.-

b. Kegiatan yang berdasarkan Pagu indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2025.

- 1) Mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja T.A. 2025;
- 2) Kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan serta keperluan perkantoran);

- 3) Kegiatan fungsi teknis Kepolisian, berupa: kegiatan Penmas, Mulmed dan PID;
- 4) Melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Bidhumas Polda Jambi, baik dibidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional modern dan terpercaya;
- 5) Mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri.

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Bidhumas Polda Jambi Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : Agustus 2024

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA JAMBI

MULIA PRIANTO, S, Sos., S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI 74100754

